

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori Perpajakan

##### A.1 Definisi Pajak

Pengertian Pajak dari Perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup>

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut *Rochmat Soemitro*

“Suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah.”<sup>6</sup>

Jika kita lihat pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan yang berbunyi :

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta. Sinar Grafika. hal.1

<sup>6</sup>*Ibid*, Adrian Sutedi

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi diatas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai beberapa definies tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Beberapa definisi diatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara
2. Penyerahan itu bersifat wajib.
3. Perpindahan/penyerahan itu berdasarkan Undang-undang peraturan/norma yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum.
4. Tidak ada kontraprestasi langsung dari pemerintah (pemungut iuran) bisa dilihat dari indikasi : (1) pembangunan infrastruktur, (2) sarana kesehatan, (3) *public facility*.
5. Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat, badan usaha baik swasta maupun pemerintah) digunakan oleh pemungut (pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (yang seharusnya) berguna bagi rakyat.<sup>8</sup>

Dengan demikian, ciri khas pajak disbanding dengan jenis pungutan lainnya ialah wajib pajak (*tax payer*) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal, tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.

---

<sup>7</sup>Pasal 1 ayat (1) Bab 1 Ketentuan Umum, Undang-undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>8</sup>Santoso Brotodihardjo. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung. Eresco. ,hal. 3

Dari definisi diatas terlihat bahwa pajak harus berdasarkan undang-undang yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR, sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan mendapat imbalan langsung. Manfaat dari pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak

## A.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dan berbagai definisi, terlihat adanya dan fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Anggaran atau Penerimaan (*Budgetair*)  
Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, dan penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan kedalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi
3. Fungsi Stabilitas  
Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah
4. Fungsi Retribusi Pendapatan  
Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Y.Sri Pudyatmoko. 2006. *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. Yogyakarta. CV Andi offset. hal. 19

### A.3 Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut :

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.<sup>10</sup>

2. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan cirri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut pemungut dan pengelolaannya, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan,

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Y.Sri Pudyatmoko

Pajak pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

#### **A.4 Asas Pemungutan Pajak**

Dalam pemungutan pajak ada beberapa dasar-dasar atau asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Asas Tempat Tinggal (domisili)  
Negara-negara yang mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.
2. Asas Kebangsaan  
Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.
3. Asas Sumber  
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.<sup>11</sup>

#### **A.5 Cara Pemungutan Pajak**

Berbicara mengenai tata cara pemungutan pajak, maka akan kita bahas secara sederhana. Dalam tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga *stelsel*, yaitu :

---

<sup>11</sup>*Ibid*, Y. Sri Pudyatmoko, hlm 24

1. *Stelsel nyata (riil stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stelsel* ini adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

2. *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. *Stelsel campuran*

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.<sup>12</sup>

## A.6 Sistem Pemungutan Pajak

Jika tadi kita telah melihat tata cara pemungutan pajak menggunakan *stelsel*, maka sekarang kita akan membahas sistem pemungutan pajak yang dibagi tiga, berikut adalah penjelasan sistem pemungutan pajaknya:

1. *Sistem official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif

---

<sup>12</sup>Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)*. Yogyakarta. CV Andi Offset.  
hal. 7

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assesment*

Sistem ini merupakan pungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.<sup>13</sup>

## **B. Pajak Penghasilan**

### **B.1 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak adalah pihak yang akan dikenakan dan terbebani pajak penghasilan, subjek pajak dikenakan atas penghasilan yang pada kenyataannya telah diterima atau diperolehnya. Subjek pajak tersebut menjadi wajib pajak apabila memenuhi syarat subjektif sebagai subjek pajak dan objektif karena menerima objek pajak.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang siapa saja yang menjadi subjek pajak penghasilan, seperti bunyi dibawah ini :

Orang yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. Orang pribadi
- b. Badan
- c. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap ditetapkan sebagai subjek pajak tersendiri karena merupakan ambang batas pemajakan antara subjek pajak luar negeri dengan dalam negeri, pengertian bentuk usaha tetap diatur dalam

---

<sup>13</sup>*Ibid*, Mardiasmo

Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang

Pajak Penghasilan :

Bentuk Usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa :

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan
- c. kantor perwakilan
- d. gedung kantor
- e. pabrik
- f. bengkel
- g. gudang
- h. ruang untuk promosi dan penjualan
- i. pertambangan dan penggalian sumber lain
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- n. orang atau badan yang kedudukannya tidak bebas
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

Pengujian badan hukum subjek pajak dalam negeri dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama sepanjang perusahaan tersebut didirikan di Indonesia, maka menjadi subjek pajak dalam negeri meskipun kedudukannya di luar negeri. Kedua, sepanjang berada di Indonesia meskipun perusahaan tersebut didirikan di luar negeri, maka dianggap subjek pajak dalam negeri.



Pada umumnya, menurut Penghindaran Pajak Berganda (P3B), badan hukum yang didirikan di Indonesia dan berkedudukan di luar negeri akan menjadi BUT di negara lain tersebut. Demikian pula sebaliknya, apabila perusahaan luar negeri berkedudukan di Indonesia, maka akan menimbulkan BUT di Indonesia<sup>14</sup>

### **B.1.a Subjek Pajak Penghasilan Dalam Negeri**

Menurut Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menjelaskan tentang salah satu subjek yang menjadi subjek pajak penghasilan dalam negeri, berikut adalah bunyi pasal tersebut:

“badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali dari badan pemerintah”

Subjek Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan baik dalam negeri atau luar negeri (*world wide income, global income, unlimited, nonterritorial income*) sesuai dengan asas domisili. Asas domisili menyebabkan adanya pertalian atau keterkaitan subjektif (personal) antara negara domisili dengan Subjek Pajak dalam negeri. Apabila Subjek Pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dari luar negeri dan negara luar negeri telah memotong pajak sesuai ketentuan P3B, maka pajak yang dipotong di luar negeri dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak yang terutang atas penghasilan dalam negeri dan luar negeri sesuai

---

<sup>14</sup>Rudy Suhartono. (et.al). 2011. *Hukum Pajak Material 1 Serial pajak Penghasilan*. Jakarta. Penerbit Salemba Humanika. Hal. 20

dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.<sup>15</sup>

### **B.1.b Subjek Pajak Luar Negeri**

Pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dijelaskan tentang siapa saja yang menjadi Subjek Pajak yang berada diluar negeri, berikut bunyi pasal tersebut :

Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribaaadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak luar negeri dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui 2 (dua) cara:

1. berada dan berusaha di Indonesia (*business in Indonesia*), sehingga berpotensi menimbulkan BUT di Indonesia dan menjadi Subjek Pajk dalam negeri. Pada umumnya, usaha yang dilakukan di Indonesia di bidang industry,dagang atau jasa

---

<sup>15</sup>*Ibid*, Rudy Suhartono.Hal. 20

(*active income*). Apabila menimbulkan BUT, maka pemajakannya sama dengan Subjek Pajak dalam negeri.

2. Tidak berada dan tidak berusaha di Indonesia, namun menerima penghasilan dari Indonesia (*business from Indonesia*). Pada umumnya, penghasilan yang diperoleh dari *passive income*, antara lain bunga, deviden, dan royalty, serta sewa. Menurut Pasal 26, pihak yang dibebani pajak adalah Subjek Pajak dalam negeri yang melakukan pembayaran dengan cara memotong pajak pada saat pembayaran.

Dengan demikian, pemajakan Subjek Pajak luar negeri menganut asas sumber, yaitu Subjek Pajak luar negeri dikenakan pajak di Indonesia sepanjang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pengenaan pajak tersebut disebabkan karena adanya pertalian objektif antara pemerintah dengan penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Oleh karena itu, pemajakan atas Subjek Pajak luar negeri bersifat terbatas, yaitu terbatas penghasilan yang berasal dari Indonesia saja (*limited/territorial income*). Pemajakan Subjek Pajak luar negeri yang tidak memenuhi BUT, namun menerima penghasilan dari Indonesia, dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri melalui pemotongan PPH Pasal 26 pada saat membayarkan penghasilan kepada Subjek Pajak luar negeri.<sup>16</sup>

## **B.2 Saat Mulai dan Berakhirnya Subjek Pajak**

Ketentuan mengenai saat mulai dan berakhirnya Subjek Pajak bertujuan menentukan saat mulai dan berakhirnya kewajiban perpajakan Subjek Pajak yang bersangkutan. Ketentuan tersebut juga mempunyai akibat pemajakan yang dapat diterapkan kepada Subjek Pajak tersebut apakah berdasarkan dengan asas sumber atau domisili.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, Rudy Suhartono. Hal.21

1. Orang Pribadi dalam negeri  
Dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
2. Badan dalam negeri  
Dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
3. Bentuk Usaha Tetap  
Dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang memenuhi syarat bentuk usaha tetap dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap
4. Subjek Pajak luar negeri  
Dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.
5. Warisan belum terbagi  
Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi<sup>17</sup>

### **B.3 Objek Pajak Penghasilan**

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Tentang Pajak Penghasilan menjelaskan objek pajak dalam pemungutan pajak penghasilan, berikut bunyi pasal diatas:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Pengantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha

<sup>17</sup>*Ibid*, Rudy Suhartono. (et.al). Hal. 21

Dengan ketentuan ini, wajib pajak tidak dapat menghindari pengenaan pajak dengan menggunakan istilah yang tidak ada dalam huruf a sampai dengan huruf c tersebut diatas atau menggunakan istilah penghasilan yang bukan objek pajak. Jenis penghasilan yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf c merupakan contoh penghasilan. Apabila suatu tambahan kemampuan ekonomis tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan c tersebut diatas, maka penghasilan tersebut tetap merupakan objek pajak penghasilan.<sup>18</sup>

### **C. Badan Hukum Asing**

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan pengertian dari badan, berikut bunyi pasal tersebut :

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

Dengan penjelasan dalam Pasal 1 ayat (3) diatas dapat disimpulkan bahwa badan juga merupakan suatu bentuk usaha tetap. Begitu pun juga termasuk badan hukum asing yang menerima penghasilan dari dalam negeri dan mendirikan cabang perusahaannya di Indonesia.

Menurut pendapat Rachmat Subekti yang dimaksud badan hukum adalah sebagai berikut :

---

<sup>18</sup>*Ibid*, Rudy Suhartono. Hal. 28

Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>19</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas maka Badan Hukum dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Badan Hukum Publik (*publiekrecht*) yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum/publik, seperti hukum pidana, hukum tatanegara, hukum tata usaha negara, hukum international dan lain sebagainya. Contoh : Negara, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia.
2. Badan Hukum Privat (*privaatrecht*) yaitu badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil atau perkumpulan orang yang mengadakan kerja sama (membentuk badan usaha) dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan Hukum Privat yang bertujuan Provit Oriented (contoh : Perseroan Terbatas) atau Non Material (contoh : Yayasan). Di Indonesia bentuk-bentuk badan usaha (Business organization) beranekaragam dan sebagian besar merupakan peninggalan pemerintah Belanda.<sup>20</sup>

Badan Hukum Asing biasanya didirikan di Indonesia dalam bentuk sebuah Perusahaan, sedangkan pengertian Perusahaan Asing adalah perusahaan yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing ( *Foreign Corporation*). Ada beberapa cabang perusahaan asing yang telah menjadi badan hukum asing atau perusahaan asing di Indonesia, contohnya adalah *Uniliver, Danone, Google Indonesia, Lazada*.

---

<sup>19</sup>Sutantyo R. Hadikusumo. 2011. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta. Rajawali Perss. hal. 18

<sup>20</sup>*Ibid*, Sutantyo R. Hadikusumo, Hal. 19

## **D. Pemeriksaan Pajak**

### **D.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Menurut Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”<sup>21</sup>

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak menyatakan hal yang sama dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berikut bunyi dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”<sup>22</sup>

### **C.2 Unsur-Unsur Pemeriksaan Pajak**

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi oleh wajib pajak sesuai dengan sistem *self assessment*.

---

<sup>21</sup>Pasal 1 ayat (25) Bab I Ketentuan Umum, Undang-undang No.28 Tahun 2007  
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>22</sup>Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.

2. Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat berbentuk wajib pajak perorangan atau wajib pajak badan. Pada umumnya periode waktu pemeriksaan pajak periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
4. Pemeriksa yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksa pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang cukup agar dapat memahami kriteria yang dipergunakan.

### **C.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Pemeriksaan Pajak yang berbunyi :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”<sup>23</sup>

Pemeriksaan pajak ini dapat dilakukan dalam rangka-rangka tertentu seperti dibawah ini :

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

---

<sup>23</sup>*Op cit*, Pasal 2 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013, *Tentang Tata Cara Pemeriksaan*



6. Pencocokan data dan/atau keterangan
7. Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah terpencil;
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
9. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

#### **D.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak**

Untuk melaksanakan pemeriksaan menurut *Erly Suandy* dijelaskan mengenai ruang lingkup pemeriksaan pajak yang terdiri atas:

##### **1. Pemeriksaan Lengkap**

Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

##### **2. Pemeriksaan Sederhana**

Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan karena selama ini pemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, biaya dan pengorbanan sumber daya lainnya, baik oleh administrasi pajak maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri, sehingga kurang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat Wajib Pajak. Pemeriksaan sederhana dilakukan melalui:

- a. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk satu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya;
- b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan, yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di lapangan dan di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) atau jenis-jenis pajak tertentu dan atau untuk tujuan

lain, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya<sup>24</sup>

### **D.5 Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak**

Jenis-jenis pemeriksaan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap:

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar
- b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi;
- c. Surat Pemberitahuan yang menyalahi penggunaan norma penghitungan

Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua tahun berturut-turut tidak lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun ketiga.

2. Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari unit atasan (Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal:

- a. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan disampaikan oleh wajib pajak tidak benar
- b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan<sup>25</sup>
- c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari direktur jenderal pajak atau kepala kantor wilayah (misalnya ada pengaduan dari masyarakat)

### **D.6 Prosedur Pemeriksaan Pajak**

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa harus:

<sup>24</sup>Wirawan B. Ilyas.(et.al). 2008. *Hukum Pajak Edisi 4*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat. Hal. 125

<sup>25</sup>*Ibid*, Wirawan B. Ilyas. (et.al) hal. 129

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Member keterangan yang diperlukan
3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
  4. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir dua di atas.<sup>26</sup>

#### **D.7 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan**

Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Hak Wajib Pajak selama proses pemeriksaan ini meliputi:
  - a. Meminta Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada pemeriksa pajak;
  - b. Meminta Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak;
  - c. Meminta penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Pemeriksa Pajak;
  - d. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen secara terperinci;
  - e. Meminta rincian dan penjelasan yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan untuk ditanggapi;
  - f. Memberikan sanggahan terhadap koreksi-koreksi yang dilakukan Pemeriksa Pajak, dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan sah dalam rangka *closing conference*
2. Kewajiban wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan pajak, maka wajib pajak wajib untuk:
  - a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;

<sup>26</sup>Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat. Hal. 213

- b. Memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
- c. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu;
- d. Memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan yang diperlukan oleh pemeriksa selama proses pemeriksaan;
- e. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;
- f. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan, bila wajib pajak tidak atau tidak seluruhnya menyetujui hasil pemeriksaan tersebut
- g. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, apabila wajib pajak/ wakil/ kuasanya menolak membantu kelancaran pemeriksaan
- h. Memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan penyegelan atau ruangan tertentu<sup>27</sup>

#### **E. Sanksi Perpajakan**

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi

---

<sup>27</sup>*Ibid*, Erly Suandy.Hal. 217

hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

Ada 2 macam Sanksi Perpajakan,

**1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:**

**a. Sanksi Administrasi Berupa Denda**

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.<sup>28</sup>

Untuk mengetahui lebih lanjut, dalam lampiran tabel 1 dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi berupa denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda.

**b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga**

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat

---

<sup>28</sup>Aris Aviantara, *Mengenal Sanksi Perpajakan*, <http://konsultanpajak-aaa.com>, diakses tanggal 27 Maret 2017

bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga.

Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya bunga dalam pajak, dapat melihat dalam lampiran tabel 2

### **c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan**

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Untuk lebih jelasnya, hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi berupa kenaikan dan besarnya kenaikan dapat dilihat dalam lampiran tabel 3

## **2. Sanksi Pidana**

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.<sup>29</sup>

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam Undang-Undang Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada. Hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi pidana dan bentuk sanksinya dapat juga dilihat pada lampiran tabel 1

## **F. Fungsi Peraturan Perundang-undangan**

### **F.1 Fungsi Peraturan Undang-Undang**

- a. Menyelenggarakan Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyebutnya
- b. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh UUD 1945

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hal.34

- c. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya<sup>30</sup>

## **F.2 Fungsi Peraturan Pemerintah**

- a. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya
- b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam Undang-Undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya

## **F.3 Fungsi Peraturan Menteri**

- a. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dibidangnya
- b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Presiden
- c. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya
- d. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya

## **G. Pengaturan Pemeriksaan Pajak**

### **G.1 Undang-Undang**

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur tentang

---

<sup>30</sup>Maria Farida.2007.*Ilmu Perundang-Undangan*.Yogyakarta.Kanisius.hal.225



kewenangan yang dapat melakukan pemeriksaan pajak, seperti bunyi pasal berikut:

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Dari bunyi pasal diatas dapat diketahui bahwa yang berwenang memeriksa pajak dari wajib pajak adalah pejabat yang berwenang dibidangnya, yaitu direktur jenderal pajak.

Sedangkan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur tentang kewajiban wajib pajak yang diperiksa, seperti bunyi pasal berikut:

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan

Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi:

“Tata Cara Pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Dalam bunyi pasal diatas dapat dikatakan tata cara pemeriksaan pajak lebih lengkap diatur tersendiri dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 jo

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan didukung oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2013 Tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Sedangkan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur tentang surat pemberitahuan yang dilakukan oleh direktur jenderal pajak kepada wajib pajak, seperti bunyi pasal sebagai berikut:

Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

## **G.2 Peraturan Pemerintah**

Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menjelaskan sebagai berikut:

Wajib pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan

Sedangkan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menjelaskan sebagai berikut:

“Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan”

## **G.2 Peraturan Menteri Keuangan**

Pemeriksaan Pajak diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 ada beberapa pasal yang disempurnakan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tetapi status peraturan menteri keuangan tahun 2013 tetap berstatus aktif dan masih digunakan sebagai dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan tersebut telah mengatur beberapa bab yang memuat antara lain:

a. Bab I : Ketentuan Umum

yang berisikan pengertian dari bagian pemeriksaan dan hasil pemeriksaan

b. Bab II : Tujuan Pemeriksaan

Dalam bab ini dijelaskan bahwa tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap subyek pajak

c. Bab III : Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Dalam bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup, kriteria, jenis pemeriksaan, standar pemeriksaan, kewajiban dan kewenangan pemeriksaan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, jangka waktu pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan, SP2 dan surat yang berisi perubahan tim pemeriksaan pajak, pemberitahuan dan panggilan pemeriksaan, peremuan dengan wajib pajak, peminjaman dokumen, pengegelan, penolakan pemeriksaan, penjelasan wajib pajak dan permintaan keterangan kepada pihak ketiga, pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan dan pengembalian dokumen, pembatalan hasil pemeriksaan, pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan selama pemeriksaan, usulan pemeriksaan bukti permulaan dan penaguhan pemeriksaan, pemeriksaan ulang.

d. Bab IV : Pemeriksaan untuk tujuan lain

Dalam bab ini berisikan sama dengan bab III tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan lain.

e. Bab V : Penyeampaian Kuisioner

Dalam bab ini menjelaskan tentang maksud diberikan kuisioner kepada wajib pajak adalah untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pemeriksaan

f. Bab VI : Ketentuan Lain-lain

Dalam bab ini menjelaskan tentang peminjaman dokumen yang dilakukan untuk memeriksa pajak dari wajib pajak

g. Bab VII : Ketentuan Penutup

Yang menjelaskan bahwa sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini beberapa Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya yang terkait Pemeriksaan Pajak dinyatakan tidak berlaku lagi

## H. Asas Perundang-Undangan

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

1. Azas legalitas, berisikan "*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*", yang artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah ada ketentuan atau undang-undangnya. Hal ini dapat dipahami bahwa segala perbuatan pelanggaran atau kejahatan apapun tidak dapat dipidana atau diberi hukuman bila tidak ada undang-undang yang mengaturnya.
2. "*Lex specialis derogat legi generali*", artinya hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Atau segala undang-undang ataupun peraturan yang khusus mengabaikan atau mengesampingkan undang-undang yang umum. Contoh : Apabila terdapat kekerasan dalam rumah tangga, maka pelaku dapat dikenai UU KDRT, bukan KUHPidana. Pemakaian hukum yang khusus ini antara lain karena hukumannya yang lebih berat dibandingkan dengan KUHPidana.

3. "*Lex posterior derogat legi priori*", artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Maksudnya ialah, UU yang baru mengabaikan atau mengesampingkan UU yang lama dalam hal yang sama. Dengan kata lain UU yang baru ini dibuat untuk melengkapi dan menyempurnakan serta mengoreksi UU yang lama. Sehingga UU yang lama sudah tidak berlaku lagi.
4. "*Lex superior derogat legi inferiori*", artinya hukum yang urutan atau tingkatnya lebih tinggi mengesampingkan atau mengabaikan hukum yang lebih rendah. Bila terdapat kasus yang sama, akan tetapi ketentuan undang-undangnya berbeda, maka ketentuan undang-undang yang dipakai adalah UU yang tingkatnya lebih tinggi. Contoh : UU lebih tinggi dari PP, maka PP diabaikan dan harus berpatokan pada UU.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>*Op Cit*, Maria Farida, hal. 252